



KANTOR CAMAT GLUMPANG BARO

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

---

## 2024

Kecamatan Glumpang Baro

Jl. Tgk Syik di Trueng Campli - Cot Glumpang,  
24183

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan program pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat, Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang mengarah pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Kantor Camat Glumpang Baro, maka kiranya perlu diuji Akuntabilitasnya melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Adapun tolok ukur untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan maka pengukuran kinerja yang dilakukan terdiri dari atas persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) melalui pengukuran kinerja kegiatan (PKK).

Dari analisa yang dilakukan bahwa nilai capaian kinerja Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro dalam rangka pelayanan, meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi serta kinerja yang optimal diperoleh nilai diatas 90 %.

Cot Glumpang, 05 Februari 2025  
CAMAT GLUMPANG BARO,

**MUHAMMAD JABANNUR, SHI, M.A.P**  
PEMBINA / NIP.19810908 199911 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan yang Maha Esa dengan Rahmat dan Karunia-Nya, Kantor Camat Glumpang Baro telah menyusun dan menyelesaikan **LAKIP** sebagai salah satu media pertanggung jawaban kepada atasan dan publik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun.

Kantor Camat Glumpang Baro Kabupaten Pidie yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah melaksanakan Program Kegiatan dengan baik tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada pengukuran Indikator Kinerja yang di capai terhadap kegiatan program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Camat Glumpang Baro.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian **LAKIP** masih banyak kekurangan, maka kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Selanjutnya, terima kasih kepada Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kasi Keistimewaan Aceh, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan beserta seluruh staf Kantor Camat Glumpang Baro Kabupaten Pidie yang telah bekerjasama dengan baik.

Demikian **LAKIP** ini disusun sebagai pertanggung jawaban kepada atasan dan terima kasih.

Cot Glumpang, 05 Februari 2025  
CAMAT GLUMPANG BARO,

**MUHAMMAD JABANNUR, SHI, M.A.P**  
PEMBINA / NIP.19810908 199911 1 002

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Aspek Strategis Organisasi .....	1
D. Gambaran Umum .....	1
E. Kedudukan, Kewenangan dan Tupoksi .....	2
F. Gambaran Umum Organisasi .....	3
G. Kondisi Sosial.....	5
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ..	6
A. Perencanaan.....	6
B. Rencana Kegiatan Tahun 2024 .....	8
C. Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. Pengukuran Kinerja .....	11
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja .....	14
C. Akuntabilitas Kinerja .....	17
BAB IV. PENUTUP .....	18
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran .....	19

---

## BAB I PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi secara transparan, efektif, dan efisien untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Glumpang Baro menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Glumpang Baro Tahun 2023-2026. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, penyusunan LAKIP ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya LAKIP, diharapkan kinerja Kecamatan Glumpang Baro dapat terus meningkat, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Glumpang Baro disusun dengan tujuan:

1. Menilai capaian kinerja tahunan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
2. Memberikan gambaran tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan publik.

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Glumpang Baro memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pada:

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
2. Penguatan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

### D. GAMBARAN UMUM

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bagian dari mewujudkan pemerintahan yang amanah (*good governance*) sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003. Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 13 Tahun 2000, berkewajiban memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan tersebut dapat tercapai dengan optimal apabila sumber daya manusia dan dana tersedia

sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi Kecamatan.

Setiap kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas pokok serta fungsi organisasi Kecamatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui pelaporan kepada atasan, lembaga pengawasan, serta pihak yang menilai akuntabilitas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pencapaian kinerja Kecamatan, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan dalam mewujudkan visi organisasi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, perlu dipertanggungjawabkan secara periodik melalui pelaporan yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan yang memberikan kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **E. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUPOKSI**

Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk memenuhi salah satu unsur dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026, yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan LAKIP tahun 2024 menyajikan laporan mengenai hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini juga memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dalam berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2024, serta sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja dan pemanfaatan sumber daya dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Tahun 2023-2026.

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;*
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;*

5. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*
6. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.*
7. *Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);*
11. *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;*
12. *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;*
13. *Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
15. *Qanun (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie;*
16. *Peraturan Bupati Pidie Nomor : 45 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2014-2017.*

## **F. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Glumpang Baro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 13 Tahun 2000, berkewajiban memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia dan dana tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga hasil yang direncanakan melalui visi dan misi Kecamatan dapat tercapai secara optimal.

Kecamatan Glumpang Baro yang dikepalai oleh Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdiri dari Sekretariat dengan 2 ( dua ) Sub Bagian yaitu 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 2 Sub Bagian Program dan Keuangan serta 5 (lima) seksi, yaitu :

1. Seksi Pemerintahan,
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,
3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan keluarga,
4. Seksi Keistimewaan Aceh,
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan yang bermutu, Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro telah berupaya memberikan pelayanan secara profesional yang ditunjang dengan sistem manajemen dan administrasi yang baik.

Sebagai gambaran mengenai sumber daya aparatur di Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro, sebelumnya hanya sebagian kecil yang berpendidikan sarjana, yang menjadi salah satu kekurangan. Namun, saat ini jumlah sarjana telah meningkat, sehingga hanya sebagian kecil yang belum sarjana. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Adapun komposisi pegawai pada Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pegawai pada Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro**  
**per 31 Desember 2024**

No.	NAMA JABATAN	STATUS PEGAWAI		JUMLAH	KET
		PNS	NON PNS		
1	2	3	4	5	6
1	Camat	1	0	1	
2	Sekretaris Kecamatan	1	0	1	
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1	
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	0	1	
3	Seksi Pemerintahan	1	1	2	
5	Seksi Keistimewaan Aceh	1	0	1	
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	1	
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1	1	2	
8	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga	1	0	1	
9	Staf	7	3	10	
11	<b>J U M L A H</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Menyelenggaraan Urusan Pemerintahan Mukim dan Gampong

3. Mengkoordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Mengkoordinasi upaya Penyelenggaraa Ketentraman danKetertiban Umum
5. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati
6. Mengkoordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7. Mengkoordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Kabupaten di Kecamatan
8. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Mukim dan Gampong
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Kabupaten yang ada di Kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    1. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten
    2. Pelayanan Penyelenggaraan Pemeintahan Kecamatan.
    3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong
    4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **G. KONDISI SOSIAL**

Kondisi Sosial Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Ringkasan Eksekutif
- c. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi dan sistematika penyajian
- d. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan strategis Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024.
- e. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.
- f. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Tahun 2024.
- g. Lampiran-Lampiran

---

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

---

#### A. PERENCANAAN

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie dituangkan kedalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima Tahun 2023-2026. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro. Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie serta dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. Hal tersebut ditempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan pada Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro yaitu Pelayanan publik yang maksimal sebagai salah satu upaya untuk memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Oleh karena itu, diharapkan dengan tersusunnya ‘LAKIP’ Kecamatan Glumpang Baro ini dapat dijadikan pedoman dan/atau panduan dalam kerangka upaya koordinasi dan pemantapan arah kebijakan dan program Pelayanan masyarakat yang baik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

#### 1. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana sebuah organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, atas dasar uraian diatas maka Visi Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie adalah :”

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK SECARA TRANSPARAN BAGI MASYARAKAT “**

#### 2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan kepada visi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka misi Kecamatan Glumpang Baro sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan pemerintahan Mukim dan Gampong;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pembinaan dan pelatihan praktis melalui pendampingan;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan syariat islam dan adat istiadat,;

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

#### a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Berdasarkan kepada visi dan misi sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tertib administrasi Kecamatan ;
2. Mewujudkan profesionalisme aparat pemerintah kecamatan;
3. Mewujudkan program pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
4. Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah

#### b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai secara nyata dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran lebih bersifat khas, dapat dinilai, dapat diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi pemerintah kecamatan;
2. Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan des tentang APB Desa;
3. Mewujudkan program pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
4. Tersusunnya dokumen renstra dan renja.

### 4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 1. Penetapan Kebijaksanaan

Bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati oleh pihak - pihak terkait dan perpaduan antara pejabat pengambilan Keputusan. Oleh karena itu kebijaksanaan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah Pemerintahan Umum.

#### 2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu instansi, merupakan penjabaran dari suatu kegiatan. Adapun program organisasi Kecamatan Glumpang Baro yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut ;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

- d. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan tindakan operasional yang nyata dan konkret untuk dilaksanakan, hal ini tentu saja kegiatan yang bermuara pada kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan. Kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
- d. Admnistrasi Umum perangkat daerah
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- f. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- g. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- i. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
- k. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

## B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

Adapun rencana kinerja Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro Tahun Anggaran 2024 adalah seperti tertera pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tersedianya Renja dan LAKIP Kecamatan	Tersusunnya Dokumen dan jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	Terbayar nya gaji dan Tunjangan	19 orang/bulan 12 Bulan

Sasaran Strategis <i>1</i>	Indikator Kinerja <i>2</i>	Target <i>3</i>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	2 orang
Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 Paket
Tersedianya bahan bacaan menurut UU	Adanya bahan bacaan menurut UU	2 Dokumen
Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Adanya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan
Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Penunjang pelayanan kantor	12 Bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penunjang pelayanan kantor	12 Bulan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penunjang pelayanan kantor	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang pelayanan kantor	3 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah	7 Unit
Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya laporan	4 Laporan
Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Tersedianya Dokumen Non Perizinan	12 Dokumen
Laporan Pelaksanaan Kewenangan	Tersedianya Laporan	12 Laporan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic indonesia

Terlaksananya pembinaan

21 Orang

Terciptanya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

12 Dokumen

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Penetapan Kinerja Kecamatan Glumpang Baro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya Tata Laksana Urusan pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintan Daerah	96,60%	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Rp. 161.382.300
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99,71%	<b>Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	Rp. 10.002.458
Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	99,97%	<b>Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	Rp. 4.928.790
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Realisasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	100%	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp. 10.231.500
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan organisasi.	100%	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Rp. 8.584.200

---

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

---

**A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler output terhadap Outcome yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau Program dengan pengukuran kinerja memungkinkan kita untuk menelusuri setiap kegiatan yang telah dilaksanakan melalui serangkaian program yang telah dilaksanakan akan mudah diketahui baik manfaat, pencapaian hasil, maupun tingkat hambatan yang dihadapi.

Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi akan memudahkan antisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan, sehingga setiap hambatan dan tantangan yang dihadapi dapat dengan mudah diambil solusi pencehannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan, ada tiga indikator kinerja yang menjadi tolak ukur yaitu .

- **Indikator Masukan ( Input )**; adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran, seperti dana, SDM, sarana dan prasarana, informasi dan lain-lain.
- **Indikator Keluaran ( Output )** ; adalah sesuatu yang dihasilkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa Fisik maupu non fisik dari suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari suatu kegiatan dalam jangka pendek ( efek langsung ) maupun dan juga merupakan seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi harapan masyarakat.

**1. Pengukuran Kinerja Kegiatan**

Pengukuran kinerja kegiatan adalah sesuatu yang sangat urgen dalam sistem pelaporan Akuntabilitas, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi akan menggambarkan keberhasilan atau tantangan yang dihadapi, sehingga setiap tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan akan memudahkan pengambilan langkah-langkah preventiv.

Berikut ini adalah serangkaian program kegiatan Kecamatan Glumpang Baro Tahun Anggaran 2024, yang diukur tingkat capaian kerjanya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Program Kegiatan Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Target capaian	Persentase Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	83%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	83%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	83%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	83%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83%
2	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik</b>	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	83%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	83%
3	<b>Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	77%
4	<b>Program Penyelenggraan urusan pemerintahan umum</b>	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	83%
5	<b>Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	93%

Pencapaian Kinerja Kegiatan secara jelas dan terperinci dapat dilihat dalam lampiran formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

## 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran Kinerja Sasaran digunakan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Pencapaian sasaran adalah dengan menggunakan indikator sasaran, yaitu ukuran pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran secara jelas dan terperinci dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2 Sasaran Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Rencana Capaian	Tingkat Capaian (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	80 %
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	100 %	80 %
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	80 %
4	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	80 %
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	80 %
6	Tersedianya bahan bacaan menurut UU	100 %	80 %
7	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	80 %
8.	Pengadaan Mebel	100%	80%

No	Sasaran	Rencana Capaian	Tingkat Capaian (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	80%
10.	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	80 %
11.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	80 %
12.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	80 %
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	80 %
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	80 %
15.	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	75%
16.	Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	100 %	80 %
17.	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	100 %	80 %
18.	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kwpolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	75%
18.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republic indonesia	100 %	80 %
17.	Terciptanya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	91%

Tingkat Pengukuran Pencapaian Sasaran secara jelas dan terperinci dapat dilihat dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) terlampir dari dokumen ini.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja keuangan dalam sistem Akuntabilitas pemerintahan adalah merupakan unsur transparansi yang harus selalu dikedepankan dalam manajemen pemerintahan modern, anggaran publik yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan wajib harus di laporkan.

Kecamatan Glumpang Baro yang merupakan salah satu SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie telah menggunakan Dana yang bersumber dari APBK Pidie Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai kegiatan-kegiatan Rutin dan pembangunan dapat dilihat kinerja keuangannya seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.444.636.828	1.328.438.744	91,96
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.239.055	2.223.000	99,56
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.387.000	1.387.000	100
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	0,0	0,0	-
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.768.455	10.625.986	99,56
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.264.390	3.264.390	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	4.200.000	100
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.652.940	5.652.940	100

10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.796.360	16.796.360	100
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.369.100	80.369.100	100
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.105.000	1.433.200	4,9
13	Belanja Pemeliharaan	27.860.000	27.859.996	99,99
14	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	5.400.000	5.400.000	100
14	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.668.775	4.668.775	100
15	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.615.695	2.587.077	99,71
16	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.717.988	2.717.988	100
17	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.928.790	4.925.370	99,9
18	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeiharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.231.500	10.231.500	100

19	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	8.584.200	8.584.200	100
----	---	-----------	-----------	-----

### C. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan unsur pokok yang harus dilaporkan dalam sistem akuntabilitas pemerintahan terhadap kinerja kegiatan yang telah di biyai dengan biaya publik, Analisis Akuntabilitas kinerja pada hakikatnya adalah untuk mengukur capaian kinerja setiap kegiatan organisasi pemerintah yang mengemukakan keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, Kecamatan Glumpang Baro pada Tahun Anggaran 2024 telah menetapkan 1 Kegiatan Rutin /Aparatur dan 7 kegiatan yang bersifat Publik dengan Pencapaian target kinerja :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
4. Admnistrasi Umum perangkat daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
9. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
11. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

---

---

## BAB IV PENUTUP

---

---

### A. KESIMPULAN

Kecamatan Glumpang Baro berusaha melaksanakan seluruh Program dan kegiatan sebagaimana direncanakan pada tahun 2024. Segala upaya telah dilakukan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima, efektif, professional dengan nurani yang islami serta terjangkau bagi masyarakat dalam Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Glumpang Baro Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro Tahun 2023-2026.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Glumpang Baro telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase capaian output kegiatan, yaitu serapan anggaran program dan kegiatan, rata-rata sebesar **99%**.

Keberhasilan ini tercapai tidak lain adalah karena adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari Kepala Daerah (Bupati) Pidie, Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian beserta seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Glumpang Baro, juga dukungan dari masyarakat Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie pada umumnya. Selain keberhasilan, tentunya tidak dipungkiri masih adanya berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki di masa-masa yang akan datang, koordinasi antar instansi SKPK yang terkait dengan Kecamatan Glumpang Baro, yang masih perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Disamping itu, muncul pula beberapa permasalahan didalam evaluasi penerapan LAKIP, antara lain seperti kurang tertibnya dalam melengkapi dan menyusun dokumen kinerja, misalnya belum/ masih kurang tepat dalam perumusan indikator kinerja, keselarasan program dan sasaran, dan sebagainya. Sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah dilakukan penataan administrasi, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara terprogram dan berkelanjutan guna mendukung kinerja Sekretariat Kecamatan Glumpang Baro ke depan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

**B.SARAN**

1. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam rangka pembinaan Kecamatan perlu ditingkatkan dana dalam APBK 2024 dan seterusnya.
2. Untuk optimalisasi pelayanan masyarakat di Kecamatan, jika anggarannya memungkinkan, kepada seluruh pegawai dilingkungan Kecamatan perlu di tambah tunjangan kesejahteraan ( TC ).

Cot Glumpang, 05 Februari 2024  
**CAMAT GLUMPANG BARO**

**MUHAMMAD JABANNUR, SHI, M.A.P**  
PEMBINA / NIP.19810908 199911 1 002